

## ABSTRAK

Sebagai bentuk tugas pembantuan di daerah maka pemerintah daerah membentuk produk hukum daerah, salah satunya yakni Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) yang dalam hal ini merupakan Peraturan Bupati. Sesuai yang dilegitimasi pada Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dalam hal ini memerintahkan bahwasanya pembentukan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian Peraturan Bupati merupakan peraturan pelaksana dari adanya Peraturan Daerah sehingga memunculkan konsep pendelegasian wewenangan antara Peraturan Daerah terhadap Peraturan Bupati tersebut. Dalam hal pembentukan peraturan bupati yang dibentuk tidak berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang lebih tinggi maka peraturan bupati tersebut mengalami kecacatan hukum secara formil sehingga memiliki dampak batal demi hukum. Untuk menjaga daripada eksistensi penyelenggaraan sinkronisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan bupati yang dibentuk tanpa dasar perda adalah dengan cara melakukan sinkronisasi secara vertical dengan berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferior*.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) sebagai bentuk contoh (*Sample*), dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

**Kata kunci:** Sinkronisasi dan Harmonisasi, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati.

## **ABSTRACT**

*As a form of assistance task in region, then region government create regional legal products, one of them, Regional Head Regulations (PERKADA) then, in this case is the Regent's Regulation. As legitimized in Article 42 paragraph (1) Minister of Home Affairs Regulation Number 120 of 2018 about Establishment of Regional Legal Products, in this case, it is ordered that the establishment of a Regional Head Regulation be stipulated on a higher level of statutory legislations. Thus the Regent's Regulation is the implementing regulation of the Regional Regulation so that it raises the concept of delegation of authority between the Regional Regulation and the Regent's Regulation. In the event that the formation of a regent's regulation is not based on a regional regulation or other higher regulations then the regent's regulation has a formal legal defect so that it has the effect of have no legal force. To keeping the existence of synchronization in the formation of laws and regulations, then the implementation of synchronization and harmonization of regent regulations that are created without the fundamental of regional regulations is by synchronizing vertically based on the principle of “lex superior derogate legi inferior”.*

*The research method in this research using by normative research method with analysis by statute approach, case approach as for sample, and conceptual approach. While, the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.*

**Keywords:** *Synchronization and Harmonization, Regional Regulation, Regent Regulation.*